

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)

Sri Mulyani¹
Anita Wijayanti
Endang Masitoh

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of institutional ownership, independent commissioner, audit committee and audit quality to tax avoidance at mining company listed on BEI year 2014-2016. The population of this study is mining companies listed on the BEI 2014-2016 as many as 46 companies. Sampling used in this research purposive sampling method. Data source is secondary data obtained from company website and BEI website (www.idx.co.id). This study uses multiple regression analysis to analyze data with the help of SPSS 21 edition program. The results of this study indicate that the variables of institutional ownership, audit committee and audit quality have significant influence on tax avoidance, while independent commissioner variable has no significant effect on tax avoidance. The results of this study are expected to be an additional consideration of the management in conducting tax avoidance is correct and efficient without violating applicable tax laws, and can provide additional information for users of financial statements in investment decision making.

Keyword : *Corporate Governance, tax avoidance*

ARTICLE INFO

Article History :

Received 05 February 2018

Accepted 12 March 2018

Available online 20 Mei 2018

Pendahuluan

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan didalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak

Page | 322

Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.3 No.1
2018

¹ Corresponden Author : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta
Telp. 085729253591
Email : yaniku_94@yahoo.com

sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan *tax planning*, di mana keduanya saling berkaitan sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak itu sendiri. Akan tetapi, *tax planning* tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu cara yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman, 2012). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014). Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi dan Harto, 2014).

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (SumiHANDAYANI, 2013). Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Praktek penghindaran pajak didalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *corporate governance*. Ada beberapa hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hasil empiris Winata (2014) membuktikan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proxy kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Khoirunnisa (2016) dibuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sheldira dan Niki (2015) Sheldira dan Niki (2015) membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil empiris tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khoirunnisa (2016), dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit yang digunakan dalam penelitian Agung, *et al* (2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan I Gusti dan Ketut (2014),

Silvia dan Puji (2014) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel kualitas audit yang digunakan dalam penelitian Nuralifmida dan Lulus (2012) membuktikan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini tidak sesuai dengan Agun, *et al* (2014), Sheldira dan Niki (2015) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan *corporate governance* sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 – 2016. Pemilihan perusahaan pertambangan didasari atas aktivitas usahanya sebagian besar dengan perpajakan, perusahaan pertambangan meliputi batu bara, minyak, gas bumi, mineral dan logam. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang nantinya dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Menurut Suharto (2015), para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu membuat keputusan. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada.

Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum, 2013). Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013).

Penelitian ini menguji apakah *corporate governance* dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Corporate governance* digunakan karena *corporate governance* diprediksi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dibagi menjadi empat proksi, yaitu kepemilikan institusional, komisaris

independen, komite audit dan kualitas audit keempatnya dianggap mempengaruhi jumlah beban pajak perusahaan.

Corporate Governance

Shleiver dan Vishny (1997) mendefinisikan *Corporate governance* merupakan serangkaian kegiatan yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investors/minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal. Menurut Nasution dan Setiawan (2007), *Corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Corporate governance dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen dan kualitas audit. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam atau di luar negeri. Kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

2. Komisaris Independen

Menurut Wardhani (2006) menyatakan salah satu permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*).

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Oktadella dan Zulaikha, 2010).

3. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap

pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu diantaranya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan

4. Kualitas audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Beberapa alasan perusahaan dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik *Big Four*, antara lain (Oktadella dan Zulaikha, 2010):

- a. Para pemegang saham menginginkan *Big Four firm*
- b. Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau dukungan dari pasar modal.
- c. *The Big Four firm* mempunyai sumber daya keuangan yang kuat untuk mempertahankan pekerjaan mereka
- d. Perusahaan publik memang dituntut untuk menggunakan *The Big Four firm* dan kualitas jasa perusahaan *The Big Four firm* alasannya karena besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis termasuk *afiliasi international* dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, *et al.*, 2008).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam suatu peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar.
Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus.
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk terdeteksi
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:
 - a. Adanya unsure artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
 - b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
 - c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Kepemilikan institusional dan *tax avoidance*

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kepemilikan saham institusional dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris independen dan *tax avoidance*

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer. Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Alviyani, 2016) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Winata (2014) membuktikan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian sebagai berikut :

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Komite audit dan *tax avoidance*

Sejak direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance (CG) perusahaan public. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit dan *tax avoidance*

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Annisa (2012) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2006) penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran atau meminimalisir pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Variabel ini menggunakan proxy *cash ETR* (*cash effective tax rate*) (Chen, et al.,2010). *cash ETR* (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan

laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Current Tax Paid}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

Kepemilikan konstitusional

Kepemilikan konstitusional yaitu adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain). Penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan prosentase (Sheldilla dan Niki 2015). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Konsep Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

Dewan komisaris independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Perhitungan Komisaris independen menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Komite audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Perhitungan komite audit adalah jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Prakosa, 2014).

Kualitas audit

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Penelitian menggunakan ini perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst dan Young*- EdanY akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Khoirunnisa 2016).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan maupun website BEI (www.idx.co.id).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 sebanyak 46 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berarti pemilihan sampel berdasarkan prosedur tertentu. Kriteria sampel penelitian ini adalah (1) Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016, (2) Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan, (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar mempermudah perhitungan *tax avoidance*. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel penelitian ini adalah 39 perusahaan didapat dari perusahaan yang memenuhi kriteria 13 perusahaan dikalikan dengan tahun pengamatan selama 3 tahun.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 21 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, Autokorelasi dan heterokendatisitas) dan uji hipotesis (uji statistik F uji statistik t dan koefisien determinasi). Persamaan regresi berganda pada penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 KI + \beta_2 PDKI + \beta_3 KuA + \beta_4 KoA + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
 β : Konstanta
 β₁β₂β₃ : Koefisien Regresi
 KI : Kepemilikan Institusional
 PDKI : Komisaris Independen
 KuA : Komite Audit
 Ko : Kualitas Audit
 ε : Faktor Pengganggu

Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2014-2016. Sampel perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan dengan total data 39 laporan keuangan perusahaan. Perolehan data yang digunakan melalui website www.idx.co.id.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Deviasi Standar
Kepemilikan Institusional	39	0,2264	0,97	0,64691	0,214680937
Komisaris Independen	39	0,3	0,5	0,389744	0,075375802
Komite Audit	39	2	4	3,230769	0,484580039
Kualitas Audit	39	0	1	0,692308	0,4675719
Tax Avoidance	39	0,2016	0,8504	0,347638	0,141589114
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 1 uji statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar error dari variabel tersebut kecil.

Hasil Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini ada beberapa uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan statistik *Kolmogorov – Smirnov Test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10138206
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,799
Asymp. Sig. (2-tailed)		,546

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai signifikansinya adalah 0,546 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi maka dilakukan pengujian Durbin – Watson (DW test). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

DW	dL	dU	4-dL	4-dU	Kesimpulan
2,151	1,2734	1,7215	2,7266	2,2785	Tidak ada Autokolerasi

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 3 didapatkan nilai DW sebesar 2,151. Dengan nilai N sebanyak 39 observasi dan jumlah variabel bebas sebanyak 4 variabel maka didapatkan nilai dL sebesar 1,2734 dan dU sebesar 1,7215 dan koefisien D-W diantara DU dengan 4-DU, sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat perolehan nilai *Variance Inflation* Faktor (VIF) dan nilai *tolerance* dari model regresi untuk masing-masing variabel bebas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

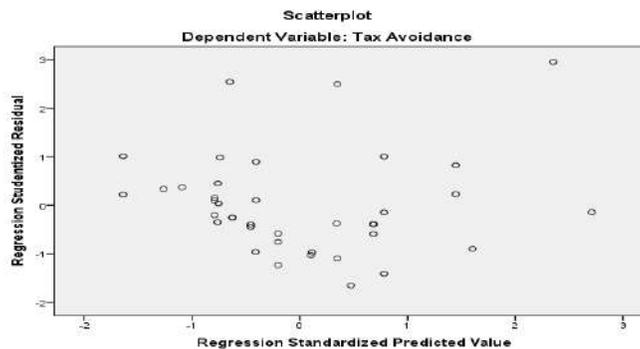
Variabel Independen	Tolerance	Standar	VIF	Standar	Keterangan
Kepemilikan Institusional	0,720	0,10	1,389	10	Tidak ada multikolinearitas
Komisaris Independen	0,934	0,10	1,071	10	Tidak ada multikolinearitas
Komite Audit	0,883	0,10	1,133	10	Tidak ada multikolinearitas
Kualitas Audit	0,677	0,10	1,477	10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak ada multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan grafik Scatterplot apabila titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah gambar hasil uji heteroskedastisitas akan disajikan dalam bentuk grafik scatterplot:.



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa titik menyebar dan tidak membentuk pola khusus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikannya (α) > 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji T

Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig	Standar	Kesimpulan
Kepemilikan Institusional	2,322	2,032	0,026	0,05	Diterima
Komisaris Independen	-0,1850	2,032	0,073	0,05	Ditolak
Komite Audit	2,854	2,032	0,007	0,05	Diterima
Kualitas Audit	-5,457	2,032	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil Uji koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berkisar diantara angka 0 sampai angka 1. Makin kecil nilai koefisien determinasi maka akan kecil kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat, begitu juga sebaliknya (Ghozali,2001). Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,698	0,487	0,427

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai R-Square yang besarnya 0,487 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel INST, KOMIND, KOMAUD dan AUDIT terhadap CASH ETR sebesar 48,7%.

Diskusi

Pada penelitian dapat ditemukan bukti empiris mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada tahun 2014-2016 dengan obyek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari empat variabel independen, hanya tiga variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien positif sebesar 0,222. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis pertama (H1) diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi *tax avoidance* ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain besar atau kecil persentasi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*.

Jensen dan meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,442. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis kedua (H2) ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel proporsi dewan komisaris independen. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentasi proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*. Hal ini memberikan kesempatan bagi manager untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa dan Kurniasih, 2012) yang menyatakan tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Temuan ini memiliki arti bahwa semakin besar prosentase variabel komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka.

Besarnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya

pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya penghindaran pajak perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Winata (2014) yang membuktikan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien positif sebesar 0,109. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis ketiga (H3) diterima**. Hasil ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Hal ini karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berpikiran jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik.

Penelitian ini berpikir apabila perusahaan hanya sampai pada ketaatan regulasi, namun belum sampai benar-benar melaksanakan prinsip yang diemban GCG. Menenerapkan segala prinsip yang berlaku dan sesuai dengan pedoman GCG diharapkan dapat memperkecil tindakan-tindakan yang merugikan berbagai pihak, khususnya *tax avoidance*. Pengevaluasian dari komite audit dengan cara yang teratur dari waktu ke waktu dapat memonitor transaksi yang menyimpang, serta keberanian untuk memberikan pendapat akan hal yang benar akan dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak. Selain itu komite audit harus didimuktahirkan dengan sistem dan teknologi yang baik agar dapat memonitor pelaksanaan GCG sudah dilaksanakan dengan benar agar dapat melindungi hak-hak *stakeholder* secara adil, dan bukan hanya berdasarkan jumlah personil dan formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, *et al.*, (2016) yang membuktikan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,024. Bukti ini menunjukkan bahwa **hipotesis keempat (H4) diterima**. Koefisien regresi yang bernilai negatif namun signifikan menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan kualitas audit yang baik. Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* dianggap

lebih berkualitas karena auditor *big four* dianggap lebih mampu membatasi praktik manajemen laba dibanding dengan auditor *non big four*.

Auditor *big four* dianggap dapat mempertahankan sikap independensi dalam kenyataan (*in fact*) sepanjang pelaksanaan audit dan, independensi dalam professional, serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* (*Power Waterhouse Coope r- PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst dan Young-EdanY*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dalam *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non the big four*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibawa, *et al.*, (2016) membuktikan bahwakualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan saham, maka semakin baik dalam melakukan *tax avoidance*.
2. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia.
3. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Jumlah komite audit yang semakin banyak, maka semakin baik dalam melakukan pengawasan *tax avoidance*.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kualitas audit, maka semakin baik penghindaran pajaknya.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor industri.
2. Variabel penelitian yang digunakan untuk memprediksi pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* masih sedikit yang tercemin dari nilai R square sebesar 48,7%.
3. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun yaitu 2014-2016.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sektor industri selain pertambangan seperti industri keuangan, pertanian, jasa atau perbankan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah masa penelitian misalnya 5 tahun untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini yaitu (1) Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik tidak perlu berupaya menghindari pajak untuk mengurangi biaya-biaya, termasuk beban pajak. (2) Anggota komite audit harus mampu membaca dan mengerti serta menganalisis laporan keuangan yang akan dipublikasikan perusahaan. (3) Perusahaan yang lebih besar diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alviyani, Khoirunnisa. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*. Vol. 3. No. Pp. 1-15.

Annisa, Nuralifmida Ayu dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1. No. 1. Pp. 1-13.

Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Tesis tidak dipublikasikan*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Chen S, Chen X, Cheng Q, dan Shevlin T. 2010. Are Family Firms More Tax Avoidance Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. Vol. 95. No. 2. Pp. 41-61.

- Cadbury Committee. 1992. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.
- Dyreg Scott D, Hanlon Michelle, Maydew Edward L, 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol. 83. No. 1. Pp. 61-82.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*. Vol. 2. No. 1. Pp.1-22.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Jakarta: Citra Graha.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3. No. 2. Pp. 1-12.
- Herawaty, Vinola. 2008. Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Mangement terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 10. No. 2. Pp. 97-108.
- I Gusti dan Ketut Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9. No. 2. Pp.16-31.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Journal of Financial Economics*. Vol. 92. No. 3. Pp. 470-490.
- Jensen Michael C dan W.H. Meckling. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. No. 4. Pp. 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak. Edisi revisi*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.

Nasution, MARIHOT dan DODDY SETIAWAN. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Nuralifmida dan Lulus. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8. No. 2. Pp.123-136.

Oktadella, Dewanti dan Zulaikha. 2010. Analisis Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-journal Universitas Diponegoro*.

Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram*.

Ratih, Puspita Silvia dan Harto, Puji. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3. No. 2. Pp. 1-13.

Sari, Kumala dan Surya Rahardja. 2011. Analisis Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Kap, Disclosure, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *E-journal Universitas Diponegoro*.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*. Vol. 10. No. 2. Pp. 85-98.

Shleifer A dan R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. Vol. 52. No. 2. Pp. 737-783.

Siswanto, Sutoyo dan Aldridge, E John. 2005. Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta : PT Damar Mulia Pustaka.

Susiana dan Arleen, Herawaty. 2007. Analisa Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.

Wibawa, Agung Wilopo dan Abdillah Yusri. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 11. No. 1. Pp. 1-9.

Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax dan Accounting Review*. Vol. 4. No. 1. Pp. 1-11.